

PERANAN ORGANISASI KEAMANAN DESA (OKD) SEBAGAI WAHANA BAGI PARA PEMUDA DALAM MENANGGAPI GEROMBOLAN DI/TII 1962

Alex Anis Ahmad

Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Siliwangi, Jln. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya
Email: AlexAnisAhmad@unsil.ac.id

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai peran OKD (Organisasi Keamanan Desa) dalam menanggapi Gerombolan DI/TII 1962. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. OKD dan TNI bekerja sama untuk menjaga keamanan masyarakat dari gangguan DI/TII. Tenaga sukarela ini tidak mendapat upah, tapi hanya diberi makan setiap hari oleh masyarakat secara bergiliran yang diatur oleh ketua RT. setiap malam OKD selalu siap siaga bahkan mengadakan patrol bersama TNI, kendati mereka selalu berada di baris terdepan waktu menghadapi aksi gerombolan DI/TII. Dengan adanya integrasi kekuatan warga masyarakat yang tergabung dalam OKD dan TNI telah menampakkan hasil, isalnya ada beberapa anggota-anggota gerombolan yang berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga bisa didapat keterangan-keterangan mengenai kegiatan mereka. Kerjasama antara kelompok ini ternyata sangat efektif diterapkan sebagai pertempuran territorial, dan sementara itu pun menjadi gerakan pukul mundur dan lari dari aksi gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Kata Kunci: *Organisasi Keamanan Desa, DI/TII*

PENDAHULUAN

Operasi penumpasan dilakukan oleh TNI, khususnya penumpasan Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih selama 13 tahun. Hal ini disebabkan operasi yang dilaksanakan bersifat konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga hasilnya tidak maksimal karena DI/TII menggunakan taktik gerilya di gunung-gunung dan operasi operasi yang dilaksanakan oleh TNI sampai dengan akhir tahun 1957 belum berhasil menangkap gembong gembong DI/TII di Jawa Barat. Setelah dilakukan inovasi taktik dan strategi oleh TNI antara lain dengan (*Isolasi Total*) dengan semboyan "*udag terus – uber terus*" dan diterapkannya "*Taktik Pagar Betis*" hasil ciptaan/gagasan Kolonel

Tjakradipura selaku Komandan Korem 062/Tarumanegara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, maka S.M. Kartosuwiryo dapat ditangkap oleh Kompi Pelda Suhanda yaitu Sersan Ara Suhara di Gunung Geber Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung pada tanggal 4 Juni 1962.

Sedangkan penumpasan DI/TII di Jawa Tengah sasarannya adalah untuk menumpas pemberontakan Batalyon 426 pimpinan Kapten Sofyan dengan melancarkan Operasi Merdeka Timur pimpinan Letkol Soeharto dan berhasil menumpas pemberontakan tersebut pada bulan Desember 1951. Dalam operasi itu gugur Mayor Sunaryo Dan Yon 417 dan Mayor Kusmanto yang gugur di daerah Klaten. Untuk mengatasi pemberontakan AUI Kyai Somolangu dan pemberontakan Amir Fatah maka dibentuk Operasi "*Gerakan Banteng*

Nasional” atau disingkat GBN di bawah pimpinan Letkol Sarbini, kemudian Letkol Bachrun dan terakhir Letkol A. Yani dengan membentuk pasukan Banteng Raiders dengan taktik “*ayam alas*” berhasil menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah dan pada tahun 1952 Amir Fatah menyerah di Tasikmalaya.

Selanjutnya dengan contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara ini, kita diharapkan mampu menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara, mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara, dan menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara.

Upaya pembelaan Negara merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai warga Negara. Selama lebih 60 tahun merdeka, telah banyak contoh upaya pembelajaran Negara yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa Indonesia, peran warga Negara dalam pembelaan Negara memiliki tingkat kewajiban yang berbeda sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Organisasi Keamanan Desa (OKD) dalam menghadapi dan menumpas Gerombolan DI/TII Tahun 1962 Khususnya di daerah Jawa Barat, maka penulis memberi judul “OKD (Organisasi Keamanan Desa) Sebagai Wahana bagi Para Pemuda Dalam Menanggapi Gerombolan DI/TII 1962”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penulis menggunakan pula metode survey dengan teknik wawancara karena memperkuat hasil studi literatur. Melalui survey diperoleh fakta-fakta yang tidak bisa diamati, keterangan pada masa lalu yang belum dicatat, bahkan opini dan

motif yang mungkin sangat penting bagi pemecahan masalah (S. Nasution, 2009:26).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan survey lapangan dan melakukan pengamatan lapangan secara fisik untuk memperoleh data secara primer. Selain itu observasi juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan wilayah secara umum sampai saat ini.

b. Wawancara

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi secara verbal dengan objek penelitian atau responden. Cara ini diharapkan timbul saing silang pendapat yang kondusif, dapat member masukan-masukan pendapat yang dianggap kurang lengkap, menyimpang, atau bahkan terlalu melebih-lebihkan keterangan.

c. Studi Literatur

Studi Literatur digunakan terutama untuk memperoleh teori-teori dan konsep yang diperlukan untuk menunjang penelitian. Dengan studi literatur diharapkan dapat meperlancar penelitian. Cara yang ditempuh dalam studiliteratur ini dengan mempelajari buku, dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditemukan.

d. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Organisasi Keamanan Desa (OKD)

Untuk menindaklanjuti penyelesaian pemulihan keamanan, pimpinan tentara bersama para pemuda yang dihimpun dalam suatu wadah untuk mengatasi kekacauan di daerah masing-masing. Para pemuda atau warga masyarakat diberi pengetahuan kemiliteran sehingga mereka memahami bagaimana cara menggunakan senjata secara tepat. Merekapun mampu melakukan kerjasama antar kelompok, bagaimana cara bertempur di waktu malam, cara melakukan pengergapan musuh, ataupun cara menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Pengetahuan itu diberikan oleh TNI mengingat serangan yang dilakukan gerombolan DI/TII biasanya menggunakan perang gerilya, oleh karena itu kepada para pemuda atau warga masyarakat yang sudah diberi pengetahuan kemiliteran oleh pemerintah dianjurkan agar membentuk suatu organisasi keamanan desa yang lebih dikenal dengan sebutan OKD (*hasil wawancara dengan Bpk. Udin*).

Organisasi Keamanan Desa (OKD) merupakan tenaga sukarela dari masyarakat yang dipersenjatai oleh TNI dan berfungsi menjaga stabilitas keamanan desa. Adapun tugas pokok OKD adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi Keamanan Desa (OKD) harus menjalankan tugas di Desa masing-masing;
- b. Yang menjadi pedoman Organisasi Keamanan Desa (OKD):
 - 1) Setiap organisasi Keamanan Desa dianggap sebagai patriot sejati pembela Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945;
 - 2) Setiap Organisasi Keamanan Desa hendaknya bertindak ramah tamah yang disertai sopan santun kepada rakyat dan tidak boleh melukai rakyat baik dengan

perkataan ataupun perbuatan.

- 3) Setiap Organisasi Keamanan Desa harus dapat menuntun rakyat ke arah rasa cinta bangsa, sehingga rasa kebangsaan sebagai bangsa Indonesia benar-benar terasa sangat meresap.
- 4) Setiap Organisasi Keamanan Desa harus bertindak tegas kepada musuh Negara dan musuh rakyat

(*hasil wawancara dengan bpk. Udin*)

OKD dan TNI bekerja sama untuk menjaga keamanan masyarakat dari gangguan DI/TII. Tenaga sukarela ini tidak mendapat upah, tapi hanya diberi makan setiap hari oleh masyarakat secara bergiliran yang diatur oleh ketua RT. setiap malam OKD selalu siap siaga bahkan mengadakan patrol bersama TNI, kendati mereka selalu berada di baris terdepan waktu menghadapi aksi gerombolan DI/TII.

Adapun sasaran OKD yaitu mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan TNI, melaksanakan operasi militer. Operasi militer ini dapat dikelompokkan kedalam operasi tempur, operasi intelejen, operasi territorial dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Puswankamra, 1972:40). Dalam kegiatan operasi tempur, mereka secara langsung mengadakan perlawanan bersenjata terhadap pemberontak, sedangkan bantuan intel mereka berupa pemberian informasi atau keterangan mengenai keberadaan DI/TII kepada TNI kemudian diadakan tindakan lebih lanjut sesuai dengan persiapan yang matang.

Dalam bidang operasi territorial dilakukan bantuan melalui perorangan untuk memisahkan gerombolan pemberontak dari rakyat, sehingga pemberontakanpun tidak akan mendapatkan dukungan apapun dari rakyat. Disamping itu kegiatan ditujukan terutama untuk memberikan bantuan logistik kepada kesatuan TNI yang

sedang mengadakan operasi. Dengan kegiatan bantuan tempur tersebut pihak DI/TII mendapat perlawanan bersenjata dimanapun mereka bergerak seperti yang dialami oleh pasukan IKD di Desa Sukapura

Ada beberapa orang DI/TII yang meminta beras kepada warga masyarakat kampung Cihurip, kemudian beras itu diantarkan ke Cihamerang (Cikutuk). Sebagian masyarakat Cihurip segera melapor kepada OKD, sehingga OKD langsung menyiapkan pasukan dengan persenjataan lengkap menuju ke Cihamerang. Ketika sudah sampai di tempat OKD yang dipimpin oleh Pak Hari melihat asap yang keluar dari gubuk kecil, setelah diteliti ternyata gerombolan DI/TII yang sedang menenak nasi (*B. sunda: Ngaliwet*). Maka OKD langsung melancarkan tembakan ke gubuk tersebut, dari kejadian tersebut berhasil ditembak tiga orang yang 2 orang laki-laki dan satu diantaranya perempuan yang merupakan istri dari salah satu gerombolan yang ditangkap tersebut. (*hasil wawancara dengan Bpk. Hari*)

Dengan operasi-operasi yang dilakukan seperti yang di paparkan diatas, maka pihak gerombolan DI/TII merasa takut jika berhadapan dengan OKD, sehingga pembakaran, pembunuhan, perampokan yang dilakukan oleh DI/TII di Desa Sukapura sedikit menurun. (*menurut narasumber: Bapak. Sapri*)

Tujuan gerakan Organisasi Keamanan Desa yaitu untuk menumpas gerakan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII dengan cara melakukan integrasi kekuatan antara warga masyarakat, OKD serta dibantu oleh TNI. Integrasi kekuatan ini terus berusaha mengepung lawan yang melarikan diri ke hutan-hutan.

Dengan adanya integrasi kekuatan warga masyarakat yang

tergabung dalam OKD dan TNI telah menampakkan hasil, isalnya ada beberapa anggota-anggota gerombolan yang berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga bisa didapat keterangan-keterangan mengenai kegiatan mereka. Kerjasama antara kelompok ini ternyata sangat efektif diterapkan sebagai pertempuran teritorial, dan sementara itu pun menjadi gerakan pukul mundur dan lari dari aksi gerombolan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia.

Sementara integrasi kekuatan OKD dan TNI melaksanakan operasi penumpasan langsung ke tempat sasaran, ternyata tempat itu disamping dijadikan sebagai tempat konsolidasi gerombolan, ada tempat lain yang dijadikan sebagai penampungan keluarga. Keberhasilan gerakan Organisasi Keamanan Desa serta TNI tidak saja menumbuhkan suasana aman, namun banyak diantara gerombolan Darul Islam yang kembali kepankuan Ibu Pertiwi (*wawancara: Bapak Udin*)

2. Peran Organisasi Keamanan Desa dalam Menumpas Gerombolan DI/TII

Seperti telah dikemukakan Organisasi Keamanan Desa (OKD) sangat berperan dalam mengatasi keamanan di Desa Sukapura terutama dalam menjaga masyarakat dari gangguan DI/TII. Dengan adanya OKD masyarakat merasa dilindungi dari ancaman DI/TII karena hampir setiap malam DI/TII menjarah ke kampung-kampung untuk meminta terhadap warga masyarakat secara paksa.

OKD hampir setiap hari setiap malam mengontrol keliling terutama di kampung yang sering dijarah dan dirampok, atau kadang-kadang dibakar oleh gerombolan DI/TII. Tugas OKD sering mengadakan penyuluhan terhadap warga masyarakat supaya tidak terpengaruh oleh hasutan-hasutan DI/TII. Sementara yang sudah pergi ke hutan dan yang menjadi anggota DI/TII segera dibujuk untuk menyerah kepada TNI untuk pulang ke kampung halamannya.

Untuk mempercepat pemulihan keamanan, OKD dan TNI mengadakan penyempurnaan operasi-operasi supaya efektif dan efisien serta mengenai sasaran. Maka di Desa Sukapura dibentuklah pagar betis, yang kegunaannya untuk memutuskan hubungan antara DI/TII dengan masyarakat supaya mereka tidak mendapatkan makanan yang biasanya memang berasal dari masyarakat itu sendiri. Di Desa Sukapura pagar betis dilaksanakan di setiap pegunungan yang merupakan tempat persembunyian DI/TII. Setiap pos dijaga oleh 7 (tujuh) orang pemuda yang sudah terlatih dan dibantu oleh OKD dan TNI sedangkan tugas penjagaan pos pada setiap hari dan setiap malam berlangsung secara bergantian.

Untuk memberikan makanan kepada para anggota TNI yang sedang melaksanakan tugasnya, diadakanlah dapur umum yang tempatnya di rumah masyarakat yang biasanya dijadikan juga sebagai penginapan para anggota TNI yang bertugas menjadi pegawai dapur umum (tukang masak) yang menurut Bapak Udin berjumlah 6 (enam), yaitu: Bapak Udin, Bapak Subana, Bapak Supriatna, Saldi, Ibu Ai, Saldi, dan Ibu Sopiah. Sebagai kepala dapur umum yaitu Samlawi dari TNI.

Dengan terbentuknya pagar betis berakibat pada kekurangan makanan para gerombolan DI/TII, sehingga banyak diantara mereka yang menyerah kepada OKD dan ada juga yang pergi ke Gunung Galunggung untuk mendapatkan perlindungan dari Kartosuwiryo. Dengan demikian peran OKD sangat vital dalam menciptakan suasana keamanan di Desa Sukapura. Oleh karena itu, OKD menjadi tumpuan harapan masyarakat dimana mereka berperan sebagai alat komunikasi antara masyarakat dengan pasukan keamanan desa lain termasuk dengan TNI dan dapat melakukan tindakan preventif akan kemungkinan terjadinya aksi gerombolan DI/TII.

3. Peran OKD dalam Memulihkan Keamanan Desa

Setelah gerombolan DI/TII menyerah, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah setempat, OKD dan TNI terutama melakukan pendekatan kepada masyarakat, yaitu dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk merehabilitasi sendi-sendi kehidupan yang telah rusak akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh gerombolan DI/TII, serta menjaga keadaan lingkungan tempat tinggal mereka dari segala kemungkinan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Usaha untuk memulihkan keamanan tersebut tidak hanya di bidang keamanan saja, namun semua diintegrasikan dalam berbagai sektor kehidupan diantaranya membangun mesjid, rumah-rumah penduduk, dan lading yang terlantar dibuka kembali dan diperbaiki. Sehingga warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk membangun dan bersosialisasi dengan warga masyarakat lainnya.

Dalam bidang pertanian, masyarakat sudah menikmati lagi hasil pertaniannya, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan berkecukupan. Kemudian di dalam situasi sosial ekonomi masyarakat Desa Sukapura setelah DI/TII menyerah ada dalam kemajuan, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hubungan sosial yang dilakukan oleh warga Desa Sukapura sudah meningkat, karena sudah tidak lagi saling mencurigai diantara tetanga. Kehidupan gotong-royong yang dilakukan warga masyarakat berjalan dengan baik dalam bidang komunikasi sesama warganya sudah berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan tampak semain membaik, pengajian yang dilaksanakan warga baik sore maupun malam hari sudah berjalan kembali. Dalam bidang pendidikan anak-anak mulai disekolahkan kembali, mengingat situasi dan kondisinya sudah memungkinkan untuk meneruskan sekolah lagi. Hubungan dusun ke dusun

cukup baik sehingga lebih melekatkan pertalian kekerabatan yang harmonis, sedangkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terjalin kembali dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Dengan demikian situasi sosial ekonomi masyarakat desa Sukapura setelah DI/TII menyerah mengalami perkembangan yang cukup baik.

Melalui tindakan-tindakan rehabilitasi dibidang ekonomi keadaan ekonomi masyarakat setempat yang telah hancur secara bertahap dapat diperbaiki. Suasana suram berganti dengan datangnya masa penuh harapan. Masyarakat pun akan berfikir jauh kedepan untuk memikirkan rencana hidup dimasa yang akan datang apabila landasan ekonomi mantap dan pembangunan akan dapat dilaksanakan.

Tunjangan untuk menaikkan taraf hidup rakyat baru dapat tercapai, apabila mereka memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan martabat manusia. Seperti apa yang dikatakan: "Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (UUD 45 Pasal 27 ayat 2). Pasal itu menentukan dan memberikan arah kepada pelaksanaan pembangunan Negara Indonesia.

Tujuan dari arah ini jelas sekali yaitu memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan. Dalam hal ini tingkat kehidupan masyarakat di Desa Sukapura sangat tergantung pada bidang pertanian dalam rangka memanfaatkan tanah dan tenaga manusia kendati masalah modal dan tenaga ahli kurang sekali. Kedua bidang tersebut sudah sewajarnya mendapat perhatian yang paling utama karena sebagian besar rakyat setempat adalah petani sedangkan kebutuhan akan pangan masih banyak dari apa yang mampu dihasilkan.

Seperti dimaklumi ialah bahwa pola perekonomian pertanian dengan demikian wajarlah apabila pemerintah sempat lebih memprioritaskan bidang itu. Dengan pembangunan bidang

pertanian, maka makin meluaslah persawahan, perkebunan, kehutanan dan peternakan yang berarti semakin banyak terbuka lapangan pekerjaan. Pembangunan akan berjalan lancar, apabila sarana perhubungan jalan lalulintas serta alat pengangkut dalam kondisi yang baik.

Pembahasan

Gerakan pemberontakan ini berawal dari gagasan/ide Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo untuk membentuk sebuah negara Islam. Kartosuwiryo mendirikan Pondok Pesantren Sufah, di Malangbong Jawa Barat. Di pondok inilah ia menggembeng pasukan Hizbullah dan sabillillah. Ia pernah menjadi sekretaris partai Masyumi Jawa Barat, bahkan pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Namun jabatan ini tidak pernah diembannya.

Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, ia dan pasukannya melancarkan perang suci melawan Belanda. Puncak dari peristiwa yang meletuskan pemberontakan Kartosuwiryo adalah hasil perundingan Renville yang mengakibatkan seluruh pasukan TNI harus melakukan hijrah ke dalam wilayah RI di Yogyakarta. Pasukan Divisi pimpinan Kartosuwiryo (bagian dari Divisi Siliwangi Jawa Barat), menyatakan tidak bersedia hijrah. Kantong-kantong TNI yang ditinggal hijrah diisi oleh pasukan Kartosuwiryo, dan meneruskan gerilya melawan Belanda di Jawa Barat.

Pada bulan Pebruari 1948, Kartosuwiryo mengubah gerakan suci melawan Belanda menjadi sebuah gerakan politik, dengan menobatkan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan menamakan pasukannya dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII).

Kontak senjata pertama terjadi dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi yang baru kembali dari Yogyakarta tanggal 25 Januari 1949. Sejak saat itu terjadi perang segi

tiga antara pasukan DI/TII – TNI – Belanda.

Tindakan pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII :

1. Pendekatan oleh pimpinan Partai Masyumi : Moh. Natsir melalui surat tidak berhasil, bahkan Kartosuwiryo secara resmi membalas surat itu dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949
2. Bulan September 1949 untuk kedua kali Moh. Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke pangkuan RI, tetapi gagal. Bahkan sejak saat itu rakyat Jawa Barat mulai mengalami teror dari gerombolan DI/TII yang sering melakukan pembunuhan, merampas harta benda rakyat untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan/gerombolan ini.
3. Setelah tindakan persuasif tidak berhasil mengembalikan Kartosuwiryo ke pangkuan ibu pertiwi, pemerintah bertindak tegas dengan menggelar Operasi Pagar Betis. Operasi yang dilaksanakan dengan bantuan rakyat Jawa barat ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gerombolan. Sehingga semakin hari semakin banyak para pengikut Kartosuwiryo yang menyerahkan diri dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Gerombolan DI/TII terdesak di Gunung Geber, Tasikmalaya.
4. Akhirnya tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengikutnya dapat ditangkap hidup-hidup dalam sebuah operasi yang diberi nama sandi Operasi Baratayudha. Dan pada tanggal 16 Agustus Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, ternyata

mendapat simpati dari berbagai daerah di Indonesia, seperti : Di Jawa Tengah, Kebumen, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh.

Penumpasan DI/TII termuat dalam Rencana Pokok (RP) dan Rencana Operasi (RO), sebagai berikut : pada tahun 1958 merupakan tahun kebangkitan pemikiran Kodam III/Siliwangi ke arah pemulihan keamanan di Jawa Barat yang lebih efektif dan efisien. Kemudian lahirnya konsep Perang Wilayah (sudah disahkan dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 merupakan manifestasi dari Undang-undang Dasar 45, pasal 30 ayat 1, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sementara itu penelitian anti gerilya berjalan terus, dan diantaranya keluarlah Rencana Pokok 211 (RP 211) yang berbunyi "*Membatasi gerak dari lawan*".

Menyesuaikan dengan mobilitas DI/TII, maka keluarlah pada waktu itu Rencana Operasi 212 pada 1 Desember 1959. Kemudian bulan Pebruari 1961 dikeluarkan Rencana Operasi 2121 (RO 2121) yang merupakan percepatan dari RO 212, isinya berupa kebijaksanaan bahwa pemulihan keamanan untuk wilayah Jawa Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu itu, hanya sampai tahun 1965. Tetapi dalam RO 2121 jangka waktu itu hanya sampai dengan tahun 1962.

Pada tahun 1956, para ulama di Priangan Timur, yang jadi basis utama gerakan DI/TII, mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan kalangan militer. Atas prakarsa kalangan militer, maka terbentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU) pada 18 Maret 1957 di Tasikmalaya. Prakarsa tersebut merupakan bagian dari kebijakan Komandan Resimen 11 Galuh Letkol Syafei Tjakradipura dan Kepala Stafnya Mayor Poniman. Resimen Galuh ini memiliki wilayah kerja Tasikmalaya dan Ciamis (Priangan Timur).

BMAU ini didirikan setelah para ulama, wakil militer dan pemerintah mengadakan pertemuan di Gedung Mitra Batik Tasikmalaya (kini, Toserba Yogya). Ulama yang hadir dalam pertemuan itu adalah KH. Ruhiyat Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Cabang Tasikmalaya (Pesantren Cipasung), KH Ishak Farid (Pesantren Cintawana), KH Fathoni (Ciamis), KH Holil Dahu (Ciamis), pengasuh Pondok Pesantren Jamanis, KH O. Hulaimi Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (Cikalang Tasikmalaya), KH R. Didi Abdulmadjid, KH. Burhan Sukaratu dan KH.Didi Dzulfadli Kalangsari (Tasikmalaya). Hadir juga Mayor R. Mustari dari Rohis (Perawatan Rohani Islam) Resimen Galuh. Selain itu ada juga Bupati Tasikmalaya dan Bupati Ciamis serta wakil-wakil dari kepolisian dan beberapa partai politik. Pertemuan itu mengambil sejumlah kesepakatan, dan yang ditunjuk memimpin BMAU itu adalah KH. R. Didi Abdulmadjid sebagai Ketua dan KH. Irfan Hilmy sebagai Penulis. Akan tetapi tidak diketemukan suatu dokumentasi dan keterangan bagaimana struktur dan personil selengkapanya dari BMAU ini.

Salah satu tujuan BMAU ini adalah untuk memulihkan stabilitas keamanan di Priangan Timur. BMAU ini juga berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pengajian, pendidikan, dan dakwah. Dengan demikian, cikal-bakal Majelis Ulama bisa dinyatakan adalah BM-AU ini. Melalui BMAU ini para ulama mewujudkan upaya menjaga keutuhan RI dengan jalur islah bainan naas (perdamaian antara sesama manusia).

Pertemuan alim ulama dan Pemerintah, sipil dan militer kemudian berlanjut diadakan pula didaerah lain, seperti Konferensi Alim Ulama Militer se-Kresidenan Banten, pertemuan Ulama Umaro Sumedang pada Juni 1958, Garut dan Bandung pada Juli 1958.

Pada 12 Juli 1958, Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I

Jawa Barat mengeluarkan Pedoman Majelis Ulama, dinyatakan Majelis Ulama berasas Islam dan mempunyai tujuan melaksanakan kerjasama dengan alat negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Dan pada 11 Agustus 1958 mengeluarkan Instruksi No.32/8/PPD/1958 kepada Semua Pelaksana Kuasa Perang Di Daerah Swatantra I Jawa Barat untuk membentuk Majelis Ulama didaerahnya masing-masing berdasarkan pada dan sesuai dengan Pedoman terlampir, dan Pelaksana Kuasa Perang yang sudah terlebih dulu membentuk Majelis tersebut supaya menyesuaikan dengan Pedoman ini.

Sebagai peningkatan dan lebih mengokohkan posisi Majelis Ulama, diselenggarakanlah Konferensi Alim Ulama-Umaro pada 7-9 Oktober 1958 bertepatan dengan 2 – 4 Rabi’ul Tsani 1377 H, di Lembang Bandung, dengan sebuah Panitia Penyelenggara yang dipimpin Let.Kol. Omon Abdurachman sebagai Ketua Umum, seorang Perwira TT III/Siliwangi. Konferensi ini diselenggarakan pasti sudah, untuk mengokohkan kebersamaan dalam menegakkan NKRI. Juru bicara Resimen 11 Galuh dalam Pemandangan umumnya antara lain mengemukakan “Setelah BMAU didirikan atas kebijaksanaan Komandan RI 11 disertai C.PR.A.D-nya dan mendapat sambutan dan dukungan yang hangat daripada ulama make segala kecurigaan, tekanan, fitnahan terhadap alim ulama lenyap dan timbul kerjasama yang erat dan saling harga menghargai disegala lapangan”. Disampaikan pula bahwa: “Rapat Alim Ulama Resimen Infantri 11 tanggal 3 Oktober 1958 di Staff Resimen Infantri 11 menyetujui BMAU diganti manjadi MU”. Dan yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah keputusan Konferensi Alim Ulama Militer se-Karesidenan Banten: “mengenai penempatan APRI dan alat negara bersenjata lainnya, harus dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan Agama didaerah mereka bertugas”,

dan “mengenai para tahanan, terutama alim ulama, yaitu supaya mendapat pelayanan dan perawatan yang layak dan segera dilakukan pemeriksaan dengan care yang jujur dan adil”.

Para tokoh ulama itu pulalah yang kemudian terlibat dalam Konferensi Alim Ulama-Umaro Daerah Swatantra I Jawa Barat di Lembang, Bandung pada 7-9 Oktober 1958. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok yang dihadapi saat itu yakni (a) usaha menyempurnakan pemulihan keamanan dan pemeliharaannya, (b) usaha menyempurnakan pembangunan dan (c) usaha penyempurnaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam Konferensi Lembang ini hadir memberikan Kata Sambutannya: Menteri Agama, KH. Moh. Ryas, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil dan Militer, KH. Wahib Wahab, K.S.A.D. Jenderal A.H. Nasution, Ketua Pengurus Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat /Panglima Teritorium III / Siliwangi Kol.RA. Kosasih.

Diantara Keputusan Konferensi ini adalah penegasan “Menyetujui dan Mempertahankan kebijakan Ketua Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat dalam membentuk Seksi Rohani dan Pendidikan beserta bagian-bagiannya (Lembaga Kesejahteraan Ummat dan “Majelis Ulama”), sebagai badan Kerja Sama Ulama-Militer-Umaro “.

Maka karenanya, personalia dengan struktur yang ditetapkan oleh Staf Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jawa Barat No. 53/8/PPD/58 tanggal 22 Agustus 1958 bersama dengan Pedoman Majelis Ulama tanggal 12 Juli 1958, yang telah diuraikan dimuka, mendapat legitimasi yang sangat kuat, untuk menghadapi situasi Jawa Barat pada kala itu.

Dengan modal ini, yang selanjutnya ditempuh jalan gerakan “Pagar Betis” menghadapi DI/TII, telah tercapai pemulihan keamanan di Jawa

Barat. Jendral A.H. Nasution adalah penggerak utama “Rencana Dasar 2,1”, yaitu gagasan yang mendasari : Musuh harus ditahan didaerah-daerah tertentu, dan aksi-aksi Republik harus dipusatkan pada salah satu daerah ini sekaligus, dengan demikian pangkalan musuh ditumpas satu demi satu. Itulah sebabnya, Divisi Siliwangi dengan dibantu Divisi Diponegoro dan Brawijaya, -yang tentu tidak merupakan kekuatan yang cukup-, *pada tahun 1960 seluruh penduduk sipil Jawa Barat diturutsertakan dalam apresiasi, dan dibentuklah secara besar-besaran “Pagar Betis”*.

Dalam gerakan “Pagar Betis” yang kadang-kadang berlangsung berhari-hari ini, penduduk sipil membentuk garis maju berangsur-angsur, dengan satuan-satuan kecil tiga sampai empat prajurit pada jarak-jarak tertentu, tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam teori, pagar betis ini disokong satuan-satuan militer dibaris depan maupun dibaris belakang. Prajurit dibarisan belakang merupakan semacam cadangan yang dapat digunakan pada tempat-tempat yang sukar dimasuki digunakan taktik tidak dimasuki, tetapi dikepung.

Dalam praktek, Tentara Republik kadang-kadang menggunakan “Pagar Betis” menjadi “Perisai Manusia”. Teknik lain yang digunakan, untuk memaksa pasukan DI/TII menyerah adalah dengan menduduki sawah yang diduga dimiliki atau dikerjakan oleh kaum kerabat mereka, agar panen tidak digunakan untuk memberi makan pasukan DI/TII. Dari proses inilah lahir adagium “*Siliwangi adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Siliwangi*”.

Maka model atau pola hubungan antara Ulama-Umaro yang dikembangkan di Jawa Barat ini kemudian menjadi salah satu prototipe model hubungan ulama dan umaro pada tingkat nasional.

1. Maka pada tingkat nasional, pada 17 Rajab 1395 bertepatan dengan 26 Juli 1975, atas prakarsa kebijakan

Pemerintah dan terapan Menteri Agama RI (Prof.Dr. H.A. Mukti Ali), Prof. Dr. HAMKA dan tokoh Bangsa lainnya, dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional I di Jakarta, tanggal 21 – 27 Juli 1958 bertepatan dengan 11 – 17 Rajab 1395.

KESIMPULAN

Gerombolan Di/TII bermula dari peristiwa ditandatanganinya perjanjian Renville, dimana salah satu ketentuannya ialah bahwa daerah Jawa Barat harus dikosongkan dari pasuka TNI yang akibatnya TNI harus hijrah ke Yogyakarta. Munculnya sejumlah 4.000 orang Hizbullah dan Sabilillah yang tidak mematuhi perjanjian tersebut, menyebabkan mereka dapat berkuasa di daerah yang telah dikosongkan itu. Sehingga Kartosuwiryo berhasil membentuk Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan beranggotakan pasukan Hizbullah dan Sabilillah sebagai modal utamanya. Negara Islam Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat di wilayah Jawa Barat dan mencapai kejayaan pada tahun 1957.

Eksistensi Negara Islam Indonesia telah berpengaruh terhadap keamanan masyarakat Jawa Barat, dengan adanya aktivitas gerombolan DI/TII yang melakukan pengrusakan, pembakaran, penggarongan, penculikan dan pembantaian terhadap warga masyarakat setempat. Seperti yang dialami oleh warga masyarakat Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Cara mempengaruhi rakyat untuk mengikuti dan merestui gerakan DI/TII ialah melalui penyusupan dengan cara menanamkan pemahaman lewat pengajian-pengajian dan menyebarkan isu-isu yang menimbulkan rasa curiga-mencurigai antara sesama warga masyarakat.

Berkat kesiapan Organisasi Keamanan Desa (OKD) TNI dan warga

masyarakat, seluruh aktivitas gerombolan DarHARIul Islam (DI) yang banyak menyengsarakan rakyat baik lahir maupun batin berhasil ditumpas. Perlu dikemukakan bahwa penumpasan yang paling berhasil adalah dengan adanya Pagar Betis yang setelah berhasil di lumpuhkan maka terjadi peningkatan di bidang sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukapura mengalami kemajuan pesat

DAFTAR PUSTAKA

- Disjarah, (1972) Cuplikan sejarah TNI AD. Bandung – Jakarta: Fa Mahjuma.
- Puswankamra. 1972. Partisipasi rakyat dalam usaha pembelaan negara. Pusat Perlawanan dan Keamanan Rakyat, Departemen Pertahanan Keamanan
- Nasution, S. (2009). *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara

Wawancara:

Bapak Udin
Bapak Sapri
Bapak Hari